

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA (Studi Pada Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung)

Oleh
Denny Fariz

Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana memerlukan strategi penegakan hukum seperti strategi *treatment* dan *rehabilitation*. Strategi dengan menggunakan dua pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotikadan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan tertulis terhadap perencanaan pelayanan untuk pecandu di lapangan. *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung masih ditemukan karena skema upaya paksa dalam Undang-Undang Narkotika masih minim dari pengawasan.

Diharapkan kepada Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung agar lebih mengoptimalkan secara represif dalam melaksanakan rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak rehabilitasi swasta yang ada di kota Bandar Lampung sehingga dimungkinkan dapat mengkoordinasikan permasalahan pecandu narkotika yang belum mendapatkan rehabilitasi khususnya pecandu yang ada di kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Hukum Pidana, Pecandu Narkotika.*